

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI IKAN DALAM BENTUK
PARTAI BESAR DI LIHAT DARI PRAKTIK SERTA
PROBLEMATIKANYA
(Studi Kasus Di Salah Satu Penjual dan Pemilik Kolam Ikan Di Desa
Ponggok Kabupaten Klaten)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

Muhamad Nur Ardhi
C.100110031

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI IKAN DALAM
BENTUK PARTAI BESAR DILIHAT DARI PRAKTIK SERTA
PROBLEMATIKANYA**

**(Studi Kasus di Salah Satu Penjual dan Pemilik Kolam Ikan
di Desa Ponggok Kabupaten Klaten)**

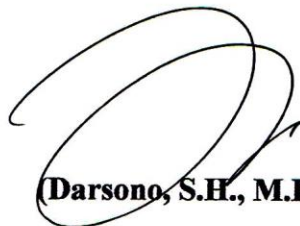
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

**MUHAMAD NUR ARDHI
C100110031**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Darsono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI IKAN DALAM BENTUK PARTAI BESAR DI LIHAT DARI PRAKTIK SERTA PROBLEMATIKANYA

(Studi Kasus Di Salah Satu Penjual dan Pemilik Kolam Ikan Di Desa
Ponggok Kabupaten Klaten)

Yang ditulis oleh:

MUHAMAD NUR ARDHI

C. 100110031

Telah diterima dan di sahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum


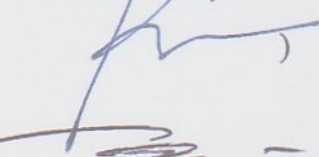

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada: Hari Senin, 29 Juni 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

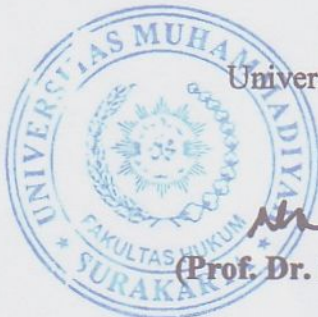
1. Darsono, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Shallman Al Farizy, S.H., M.H., M.Kn
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Agustus 2017

Yang menyatakan



Muhamad Nur Ardhi

C100110031

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI IKAN DALAM BENTUK
PARTAI BESAR DI LIHAT DARI PRAKTIK SERTA
PROBLEMATIKANYA
(Studi Kasus Di Salah Satu Penjual dan Pemilik Kolam Ikan Di Desa
Ponggok Kabupaten Klaten)**

Abstrak

Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum Perjanjian jual beli, terutama di dalam hal tinjauan yuridis perjanjian jual beli ikan dalam bentuk partai besar dilihat dari praktik serta problematikanya. Data primer diperoleh dari penulis melalui hasil wawancara dengan pihak penjual dan pemilik kolam. Teknik analisa data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli antara pihak penjual ikan dan pihak pembeli beserta dengan penyelesaian permasalahan dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual ikan dan pihak pembeli dilakukan secara sederhana dan lisan berdasarkan syarat sahnya perjanjian jual beli yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Problem atau masalah yang muncul, telatnya pembayaran yang tidak tepat waktu dan resiko saat pengiriman barang (ikan) dan pada saat penagihan pembayaran. Penyelesaian kasus terjadi dilakukan secara kekeluargaan.

Kata kunci: Pemilik sekaligus penjual ikan bentuk partai besar. Wanprestasi

Abstract

Muhamad Nur Ardhi. C 100110031. juridical review of the covenant of purchase of the fish in the form of the major party in see from the practice of fiber problematkanya (case studies one of the seller and the owner of a fish pond in the village ponggok kabupaten klaten)”

Based on uses theoretically so it is hoped the result this research can contributed knowledge of law especially testament law trading , especially in this review juridical agreement trading fish in the form of the major party look at from practices and problematkanya .Data a primary in gathered from writer through the results of interviews with the the seller and the owner pond. Technique data analysis in do with the method of analysis data qualitative.This study attempts to understand the implementation of the perjanjianl trading between parties fish sellers and the purchasers and by the completion of the problems and next organized as thesis that is scientific. greement the bargain which carried out by the fish sellers and the purchasers be done in simple and oral based on condition validity of the agreement the bargain which set in the book the act of civil law.The problem or problems that arise, telatnya payments that could not on time and risk when delivery of goods (fish) and when billing payment.solution cases occurred done in a family.

Keywords: owner and fishmonger the form of the major party .breach of contract

1. PENDAHULUAN

Masyarakat lebih cenderung mengkonsumsi makanan yang mengandung nilai gizi yang cukup. Salah satu jenis makanan yang banyak dikonsumsi ialah ikan. Ikan Sebagai bahan pangan merupakan sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral yang sangat baik. Hal tersebut bukan tanpa alasan, ikan merupakan salah satu makanan yang mempunyai kandungan gizi yang sangat baik bagi tubuh. Apalagi ikan air tawar yang di nilai kandungan gizi ikan air tawar cukup tinggi dan hampir setara dengan ikan air laut, sehingga dianjurkan untuk dikonsumsi dalam jumlah cukup.¹

Setiap orang yang memiliki rumah makan atau restoran yang menyediakan menu masakan ikan air tawar akan meminta bantuan kepada peternak pengelola ikan untuk memasok setiap kebutuhannya kepada pemilik rumah makan atau restoran itu. Pihak yang mempunyai restoran atau rumah makan itu dikatakan sebagai pemesan, ia dapat memesan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pihak penjual menawarkan harga kepada pemesan kemudian pemesan menyetujui. Setelah itu apabila kedua belah pihak yaitu pemesan sudah setuju dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemesanan dan pihak penjual menyanggupi untuk menyiapkan kebutuhan pihak pemesan maka mereka akan bersepakat.

Sebenarnya antara pihak penjual dan pihak pemesan itu telah terjadi interaksi yang menyebabkan hubungan hukum diantara mereka. Meskipun hal itu tanpa di sadari atau tidak oleh mereka, karena dianggap hal yang biasa. Peristiwa diatas sebenarnya telah termasuk sebagai bentuk suatu perjanjian, yang dimana perjanjian itu untuk melakukan atau mengerjakan kepentingan pemesan yang di kerjakan oleh pihak penjual.

Lahirnya perikatan dalam suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari pernyataan di atas menyatakan bahwa adanya suatu kesepakatan yang dimana

¹Siswono <https://ikanmania.wordpress.com/2008/03/02/ikan-air-tawar-kaya-protein-dan-vitamin> surakarta, Kamis 15 September 2016, pukul 19:30

pihak penjual sepakat dengan pihak pemesan untuk menyiapkan ikan sesuai kebutuhan pemesan. Padahal dalam hukum perjanjian yang berlaku “asas konsensualisme, yaitu pada dasarnya suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karenanya itu sudah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan”.²

Selain hal itu dalam kesepakatan mereka merupakan salah satu syarat sahnya dalam perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Diakui juga dalam KUHPerdata tentang adanya sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, yaitu dalam pasal 1338 ayat (1). Terkait dengan pengertian perjanjian J. Satrio SH mengemukakan bahwa perjanjian ialah tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dimkehendaki (atau di anggap tidak dikehendaki) oleh para pihak yang di dalam tersimpul andanya sepakat.³ Selanjutnya Abdulkadir Muhammad juga menyimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁴

Perjanjian yang terjadi di atas akan sangat rentan timbul wanprestasi oleh salah satu pihak, di karenakan pemesan telah memberikan tanggung jawab kepada pihak penjual untuk menyediakan ikan-ikan yang di butuhkan oleh pemesan. Tetapi disisi lain pihak penjual tidak dapat menyediakan ikan sesuai kebutuhan pihak pemesan, maka pelanggan dapat mengalami kerugian yang di tanggung baik kerugian materil. Kerugian materil yaitu pihak pemesan sudah memberikan uang muka kepada peternak yang diberikan tanggung jawab menyediakan ikan sesuai kebutuhan pemesan.

Kesalahan dalam perjanjian jual beli ini tidak selalu pelanggan (pembeli) saja yang di rugikan, melainkan pihak penjual juga dapat dirugikan. Misalnya yaitu pihak penjual sudah memenuhi kewajibannya menyediakan ikan sesuai kebutuhan pemesan, tetapi pihak pemesan terlambat melunasi pembayaran. Tentu oleh hal itu pihak penjual juga merasa dirugikan, terkait dengan masalah pembayaran. Meskipun para pihak mengetahui akan resiko tersebut seperti di atas,

²R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian* , jakarta: intermasa, hal. 15.

³ J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 21 & 22

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 224

tetapi tetap saja mereka melakukan hal tersebut dan mengesampingkan hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Problem apakah yang terjadi dalam jual beli ikan antara peternak (penjual) dan pemesan (pembeli)? (2) Bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui problem penjualan ikan yang dilakukan pihak penjual dan pihak pembeli. (2) Untuk mengetahui penyelesaian terkait saat perjanjian dilakukan.

Manfaat penelitian adalah (1) Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan serta pengetahuan para pembaca mengenai hukum perjanjian. (2) Sebagai sumbangan pikiran bagi praktisi hukum dalam kaitannya dengan perjanjian jual beli ikan dalam bentuk partai besar. (3) Memberi gambaran serta informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum non doktrinal kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah deskriptif. Data primer diperoleh dari penulis melalui hasil wawancara dengan pihak penjual dan pemilik kolam. Teknik analisa data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Problem yang terjadi dalam jual beli ikan antara penjual dan pembeli

Menurut Salim H.S., S.H. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.⁵ Jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan”. Pada dasarnya dalam jual beli terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian jual beli dianggap sah, dalam syarat

⁵M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal. 181.

sahnya perjanjian sendiri diperlukan 4 syarat yaitu: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, ketika orang atau pihak satu akan melakukan suatu perbuatan hukum atau perjanjian dengan pihak kedua harus di landasi dengan kesepakatan. Kesepakatan merupakan syarat utama yang harus ada, karena dalam perjanjian setidaknya-tidaknya ada dua pihak yang saling berkepentingan. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik tanpa adanya paksaan atau penipuan. Misalnya penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan pembeli (pemesan) menginginkan sebuah barang dari penjual. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1321 KUH Perdata yang bunyinya: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. (2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian: Ketika orang akan membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Cakap menurut hukum yaitu setiap orang atau akil baliq dan sehat pikirannya itu bisa disebut cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdata sebagian orang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu: (a) Orang-orang yang belum dewasa (b) Mereka yang di taruh di bawah pengampuan (c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian (persetujuan) tertentu⁶. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan cakap melakukan tindakan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 21 (dua puluh) tahun tetapi sudah kawin. Bagi orang yang belum dewasa apabila akan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya, selanjutnya bagi yang ditaruh dalam pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Selanjutnya yang ke (3) Suatu hal tertentu yaitu: apa yang diperjanjikan obyek perjanjian setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan jenisnya. Mengenai jumlahnya tidak perlu ditentukan asal dapat diperhitungkan kemudian. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 1332 KUHPerdata yang berbunyi: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Pada Pasal 1333 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus mempunyai

⁶. Prof . Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hal. 19.

sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.Kemudian pada Pasal 1334 KUHPerdara disebutkan: ”Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Dalam bunyi pasal-pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa barang-barang yang dianggap mempunyai nilai atau kedepannya dianggap akan mempunyai nilai, akan dapat menjadi pokok suatu perjanjian (dapat diperjanjikan).

Berikutnya yang ke (4) Suatu sebab yang halal yaitu suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Sebab di sini bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, tetapi lebih mengacu pada pengertian di atas tadi. Terlepas dari itu semua menurut Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan mengenai sebab yang halal yaitu: “Suatu sebab yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketentuan umum”. Perjanjian yang dibuat tanpa sebab dan dibuat karena sebab yang palsu atau orang yang terlarang tidak mempunyai kekuatan, hal ini sesuai dengan Pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Melihat dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, dapat digolongkan menjadi dua yaitu: dua syarat pertama merupakan syarat subyektif (orang/para pihak), karena mengenai orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat-syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif (benda yang menjadi pokok/isi dari kesepakatan) karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Pada proses jual beli ini, tentu tidak selalu berjalan dengan baik. Pasti ada sedikit permasalahan yang terjadi dalam kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Setiap jual beli walaupun sudah ada kesepakatan yang di sepakati oleh kedua belah pihak tetapi ada saja masalah yang timbul, baik yang di lakukan penjual maupun di lakukan oleh pembeli. Meskipun perjanjian atau kesepakatan di buat secara tertulis ataupun secara baku namun seringkali ada pihak yang melanggar isi dari perjanjian jual beli tersebut.

Dalam kasus jual beli ikan ini, tentu tidak selalu berjalan dengan baik. Pasti ada sedikit permasalahan yang terjadi dalam kesepakatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Setiap jual beli walaupun sudah ada kesepakatan yang di sepakati oleh kedua belah pihak tetapi ada saja masalah yang timbul, baik yang di lakukan penjual maupun di lakukan oleh pembeli.

Meskipun perjanjian atau kesepakatan di buat secara tertulis ataupun secara baku namun seringkali ada pihak yang melanggar isi dari perjanjian jual beli tersebut. Terkait dengan perjanjian jual beli ikan ini biasanya hanya dengan kesepakatan lisan saja tanpa ada nota perjanjian atau akta perjanjian yang formal. Menurut pak fendi, jual beli ikan ini lebih sering menggunakan perjanjian atau kesepakatan yang secara lisan yang di sepakati oleh penjual dan pembeli, meskipun begitu, tetap ada bukti tertulis untuk memperkuat praktek jual beli ikan ini. Sebagai contoh salah satunya meski pun tidak ada akta perjanjian tetapi tetap diwajibkan menggunakan kwitansi yang menyebutkan nominal yang di sepakati sebagai bukti dari pembelian itu sendiri.

Jual beli ikan yang di lakukan di tambak tempat Bapak Fendi, untuk setiap pembeli dari luar daerah sekitar maka akan di haruskan membayar dengan sistem pembayaran cash atau secara langsung (tunai). Akan tetapi untuk pembeli lokal atau di dalam daerah yang masih bisa di jangkau posisinya, biasanya pembayarannya bisa dengan uang muka dulu (menggunakan sistem cicilan dan tempo), lalu setelah membayarkan uang muka tersebut maka dilakukan pelunasan pembayaran yang telah disepakati tata cara dan jangka waktunya. Menurut Bapak Fendi, permasalahan yang sering terjadi terkait dengan masalah pembayaran yang tidak tepat waktu.

Masalah yang sering terjadi adalah mengenai pembayaran, pembeli kebanyakan tidak bisa melunasi pembayaran sesuai dengan waktu yang telah di sepakati sebelumnya. Untuk hal ini, pembeli yang tidak dapat melunasi pembayaran tersebut yang semestinya sudah lunas selalu mempunyai banyak alasan yang membuat penjual mengalami kerugian. Kerugian yang di terima penjual akibat pembeli yang tidak melunasi pembayaran tepat waktu, bisa saja berupa kerugian materiil maupun imateriil.

Kerugian materiil akibat dari keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yaitu pihak penjual disini akan mengalami kerugian sehingga tidak bisa mencukupi biaya operasional. Seperti pengadaan ikan yang semestinya bisa di siapkan untuk pemesan lainnya tetapi oleh karena tidak tercukupinya biaya untuk pembelian pakan dan benih ikan dalam pembudidayaan ikan atau tambak ikan yang di milikinya. Tentu akan hal tersebut sangat merugikan bagi pihak penjual.

Kerugian imateriil yang di terima oleh pihak penjual ialah dengan tidak tepatnya pelunasan yang dilakukan oleh pembeli maka penjual tidak dapat menyediakan atau mengembangkan jumlah ikan yang ada di tambaknya. Padahal masih ada banyak pembeli lainnya yang akan memesan ikan dalam jumlah yang banyak akan tetapi penjual tidak dapat menyediakan ikan dalam jumlah banyak yang di akibatkan tidak adanya modal untuk menyediakan ikan tersebut kepada pembeli lain yang akan memesannya. Tentu dalam hal ini penjual merasa malu karena tidak dapat menyediakan ikan sesuai dengan jumlah permintaan yang disepakati, hal tersebut membuat kepercayaan pembeli pun menjadi hilang dan untuk pembelian selanjutnya mungkin tidak akan dipercayakan lagi pada penjual yang seperti ini.

Kasus jual beli ikan disini, pembeli yang kerap kali melakukan wanprestasi yaitu berbentuk keterlambatan pembayaran yang mana hal ini tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan diawal perjanjian. Pembeli awalnya setuju mengenai jumlah dan tempo waktu pelunasan pembayaran akan tetapi seringkali pembayaran yang dilakukan tidak sesuai dengan jumlah dan tempo yang telah di sepakati sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk dari wanprestasi.

Pada setiap usaha, tentu memiliki resiko masing-masing, begitu pula dengan jual beli ikan. Terkait dalam penjualan ikan disini, adapun resiko kerugiannya adalah dalam proses pengiriman banyak ikan yang mati. Hal tersebut menjadi kerugian bagi penjual. Semakin sedikit ikan yang mati, maka semakin banyak pula keuntungan bagi penjual. Pembeli tidak mau tau terhadap kerugian kematian ikan yang terjadi selama proses pengiriman ikan dijalan. Hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penjual ikan.

Problematika atau permasalahan lainnya yaitu terkait pada saat pengiriman ikan dalam jarak jauh. Biasanya ikan di pastikan ada yang mati pada saat pengiriman di jalan. Hal ini di karenakan setelan dari oksigen yang terlalu besar atau terlalu kecil. Saat pengiriman apabila oksigennya terlalu kencang maka ikan akan mati karena pergerakan dari oksigen itu membuat ikan akan terguncang lebih keras. Tetapi kalau setelan oksigen terlalu kecil maka ikan yang di dalam bak itu sendiri akan mati karena ikan dalam jumlah banyak akan kekurangan oksigen. Menurut pak fendi sendiri kematian ikan saat pengiriman itu adalah kerugian bagi pak fendi.⁷

3.2. Penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak

Penyelesaian masalah untuk kasus tersebut adalah dengan cara pihak penjual biasanya menjelaskan terlebih dahulu di awal sebelum terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli yang meliputi kapan pelunasan pembayarannya, berapa banyak jumlah ikan yang dipesan dan apa jenis ikannya serta berapakah ukuran ikan, dan juga kapan diambilnya, sehingga pihak pembeli tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Apabila masih melanggar kesepakatan, maka penyelesaian yang dilakukan kedua belah pihak lebih sering dilakukan secara kekeluargaan.

Penyelesaian yang dilakukan adalah dengan jalan musyawarah. Sampai saat ini, apabila terjadi masalah, dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah atau dengan cara kekeluargaan. Penyelesaian secara hukum dinilai kurang sesuai, karena prosesnya dirasa terlalu berbelit-belit dan lama. Penyelesaian masalah didesa ponggok lebih menekankan sistem musyawarah atau kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan di nilai dapat menyelesaikan kasus kasus yang terjadi pada saat kegiatan jual beli ikan.

⁷ Fendi, Pemilik Tambak Sekaligus Penjual Ikan, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu 18 Januari 2017, Pukul 16.00 WIB

Selanjutnya penyelesaian problematika lainnya yaitu penyelesaian untuk problematika jual beli ikan pada saat ikan mati dalam proses pengiriman, apabila ikan mati dalam proses pengiriman itu adalah kerugian bagi para penjual dan harga ikan tersebut tidak di hitung atau harga akan di potong sebab pembeli tidak mau tau akan hal tersebut.⁸ Hal ini sudah biasa dikalangan para penjual dan bukan merupakan hal asing lagi, oleh karenanya hal-hal seperti ini tidak dipermasalahkan oleh para penjual ikan didesa ponggok dan di karnakan masalah seperti itu wajar ketika ikan mati saat pengiriman. Untuk menghindari masalah seperti ini, maka perlu diperjelas dulu berapa jumlah ikan yang harus diantar, lalu setelah itu menyiapkan wadah yang cukup besar bagi ikan-ikan tersebut barulah setelah itu mengatur oksigen ikan.

Apabila wadah ikan terlalu kecil maka akan banyak ikan yang mati sehingga kerugianpun akan semakin banyak, akan tetapi apabila wadahnya cukup besar maka ikan yang mati akan sedikit sehingga kerugianpun bisa diminimalisir. Mengenai masalah oksigen, para penjual sudah paham mengenai aturan oksigen ini. Apabila terlalu besar maka ikan akan menjadi gelisah dan bergerak kesana kemari sehingga akhirnya ikan-ikan tersebut banyak yang mati, sebaliknya apabila pengaturan oksigen yang dikeluarkan terlalu kecil maka ikan akan kekurangan udara dan juga akan banyak ikan yang mati, oleh karena itulah pengaturan oksigen untuk ikan ini harus disesuaikan artinya tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil (pengaturan oksigennya secukupnya saja untuk jumlah ikan didalam wadah).

Berkaitan dengan cara penyelesaian yang di lakukan para pihak lebih sering menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan. Melihat dari beberapa kasus dan masalah yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ikan di atas dapat di simpulkan bahwa dalam penyelesaiannya pihak penjual lebih sering memilih untuk mengalah dengan alasan agar masalah yang terjadi tidak menjadi panjang dan cepat terselesaikan.

⁸ Fendi, Pemilik Tambak Sekaligus Penjual Ikan, *Wawancara Pribadi*, Klaten, Rabu 18 Januari 2017, Pukul 16.00 WIB

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pertama, Problem yang terjadi dalam jual beli ikan antara penjual dan pembeli antara lain adalah praktik perjanjian jual beli ikan partai besar berdasarkan kesepakatan yang hanya berdasarkan pada ucapan lisan saja, yang artinya tanpa perjanjian tertulis yang dimana diuraikan mengenai keterangan-keterangan secara detail oleh penjual dan pembeli. Dengan hal tersebut muncul banyak problem yang terjadi dikemudian hari yaitu lebih sering terkait tentang masalah pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sering terjadi dan dilakukan oleh pihak pembeli. Tentu hal ini membuat penjual mengalami kerugian baik bersifat materiil maupun non materiil. Kerugian materiilnya ialah penjual tidak bisa mencukupi akan biaya oprasional terkait dengan pengadaan ikan yang semestinya bisa di siapkan untuk pemesan lainnya, hal ini terkait dengan tidak tercukupinya biaya untuk pembelian pakan dalam pembudidayaan ikan atau tambak ikan yang di milikinya. Tentu hal tersebut sangat merugikan bagi pihak penjual.

Kemudian untuk kerugian immateriilnya ialah dengan tidak tepatnya pelunasan yang dilakukan oleh pemebeli maka penjual tidak dapat menyediakan atau mengembangkan jumlah ikan yang ada di tambaknya. Padahal masih ada banyak pembeli lainnya yang akan memesan ikan dalam jumlah yang banyak tetapi penjual tidak dapat menyediakan ikan dalam jumlah banyak yang di akibatkan tidak adanya modal untuk menyediakan ikan tersebut kepada pemebeli lain yang akan memesannya. Tentu dalam hal ini penjual merasa malu karena tidak dapat menyediakan ikan sesuai dengan jumlah permintaan.

Kedua, problematika lainnya yang sering terjadi dalam praktik jual beli ini yaitu terkait pada saat pengiriman ikan dalam jarak jauh itu itu biasanya ikan dapat di pastikan ada yang ikan mati pada saat pengiriman di jalan yang di karenakan setelan dari oksigen yang terlalu keras atau kekecilan. Tentu ini berdampak pada berkurangnya kepercayaan oleh pembeli kepada penjual yang

berakibat langsung pada nominal uang yang harus dibayarkan. Apabila ada ikan yang mati saat pengiriman maka secara otomatis jumlah nominal pembayaran akan dipotong atau dikurangi dari nilai yang telah disepakati tergantung pada banyaknya jumlah ikan yang mati saat pengiriman. Cara penyelesaiannya para pihak jika terjadi masalah seperti di atas senringkalidengan cara kekeluargaan atau musyawarah.

4.2. Saran

Pertama Pihak penjual seharusnya membuat prosedur pemesanan yang tegas, terutama terkait dengan pembayaran. Salah satunya bagi pembeli harus melunasi seluruh pemesanan setelah dilakukannya pengiriman ikan, maksimal dibayarkan terhitung 1 (satu) minggu setelah pengiriman ikan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi mundurnya pelunasan pembayaran yang dilakuakn oleh pembeli. Juga agaar penjual dapat mengembangkan usahanya apabila penjual mendapatkan pelunasan yang tepat waktu untuk biaya operasional pengadaan ikan lagi.

Kedua pihak pembeli hendaknya memenuhi kewajibanya sebagaimana yang telah di sepakati di awal perjnjian. Pembeli harus menyesuaikan jumlah ikan yang di belinya sesuai dengan kemampuan pembayaranya, hal ini dilihat dari kondisi ekonomi pihak pembeli itu sendiri apakah tergolong kategori pembeli mampu atau menengah kebawah sehingga hal ini akan meminimalisir terjandinya wanprestasi atau pelanggaran-pelanggaran dalam proses jual beli ini.

Ketiga, Bagi pembaca adanya hasil penelitian sekripsi ini diharqapkan dapat menumbhkan sikap kehati-hatian bagi para pembaca agar tidak terjadi kasus yang serupa dan juga di harapkan lebih menekankan sikap kekeluargaan dan musyawarah dalam hal penyelesaian suatu masalah. Misalnya kasus jual beli seperti di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni

Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa

Subekti, R., 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa

Internet:

Siswono, <https://ikanmania.wordpress.com/2008/03/02/ikan-air-tawar-kaya-protein-dan-vitamin> surakarta, Kamis 15 September 2016, pukul 19:30